

BULETIN



PARLEMENTARIA

NOMOR 893/IV/I/2016



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

KARTU IDENTITAS PESERTA

Seluruh RS Harus Melayani **PASIEN PENGGUNA BPJS**



PEMERINTAH
JANGAN LUPAKAN
POTENSI
PETERNAKAN LOKAL



KOMISI VII
MINTA PLN
BERANTAS MAFIA
PROYEK LISTRIK



Jangan Lewatkan info DPR terkini
dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id



SELURUH RS HARUS MELAYANI PASIEN PENGGUNA BPJS



KOMISI IX DPR melakukan kunjungan spesifik ke Rumah Sakit Siloam dan RSUD Tangerang, Kamis (4/2) meninjau pasien DBD pengguna BPJS yang di dalamnya terdapat Penerima Bantuan Iuran (PBI)



Komisi IX DPR melakukan kunjungan ke RSUD Tangerang

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Ermalena mengatakan ini merupakan kunjungan on the spot Komisi IX, sebagai tugas pengawasan. Dalam Hal ini Komisi IX yang diwakili oleh 17 anggota melihat dan memantau bagaimana pelayanan kepada pasien pengguna BPJS di Rumah Sakit Swasta dan RSUD Tangerang apakah terjadi kendala.

“Kita hanya ingin memastikan bahwa rakyat Indonesia mendapat haknya dalam pelayanan kesehatan. Kita juga berharap seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia berpartisipasi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat termasuk pengguna BPJS” tambahnya.

Hal senada disampaikan Anggota

Komisi IX Amelia Anggraini. “APBN sudah mengalokasikan anggaran kesehatan sebagaimana amanat UU. Jadi lakukan dan manfaatkanlah anggaran yang sudah diberikan semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Pemantauan Komisi IX DPR memang terlihat ada perbedaan pelayanan tetapi disebabkan perbedaan besarnya rumah sakit dan fasilitas yang tersedia. RSUD Tangerang sebelumnya berada di Kabupaten namun sekarang dari registrasi sudah cukup sistematis.

Sementara anggota DPR Komisi IX Tgk. Khaidir mengatakan RS Siloam cukup menarik untuk dijadikan contoh,

misalnya dari segi pelayanan dokter, suster tidak ada yang memainkan HP, semua fokus kepada pelayanan pasien.

Komisi IX pun juga berkesempatan menjenguk pasien yang terkena wabah DBD di Rumah Sakit Siloam. Diketahui terdapat 132 orang pasien dan sekitar 20 orang meninggal terhitung dari Desember lalu.

“Langkah-langkah preventif harus segera diambil. Karena wabah DBD ini selalu terjadi setiap tahunnya. Ini tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja harus ada aksi nyata dari pemerintah supaya efeknya dirasakan oleh masyarakat,” ujar Amel politisi Nasdem. (rnm,mp), [foto : jayadi/parle/hr](http://foto:jayadi/parle/hr).



**BULETIN
PARLEMENTARIA**

SUSUNAN REDAKSI

PENGAWAS UMUM : Pimpinan DPR-RI ● **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** : Dr. Winantuningtyastuti, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) ● **WAKIL KETUA PENGARAH** : Dra. Damayanti, M.Si, (DEPUTI PERSIDANGAN) ● **PIMPINAN REDAKSI** : Drs.Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) ● **WK. PIMPINAN REDAKSI** : Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak) ● **REDAKTUR** : Mastur Prantono ● **SEKRETARIS REDAKSI** : Suciati, S.Sos, ANGGOTA REDAKSI : Nita Juwita, S.Sos, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Hendra Sunandar, Surahmad Eko, Ria Nur Mega ● **REDAKTUR FOTO** : Eka Hindra, Iwan Armanias ● **FOTOGRAFER** : Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Devi Iriandi, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah ● **ADMINISTRASI FOTO** : Hasri Mentari ● **SIRKULASI** : Bagus Mudjiharjanto ● **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** : Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN : Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan) **WK. PIMPINAN PENERBITAN**: Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) Email : penerbitandpr@gmail.com
[isi berita dan materi foto diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan]

KOMISI IX MINTA VIRUS ZIKA PERLU PERHATIAN KHUSUS

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena menyatakan turut prihatin dengan menyebarnya virus Zika, apalagi WHO menyebut virus tersebut sebagai ancaman global.

DI kawasan Asia pun kini dalam status waspada meski kasus virus ini belum ditemukan. Virus yang berasal dari nyamuk ini sangat berbahaya bagi ibu yang sedang mengandung karena anaknya akan mengalami kelainan otak atau cacat.

Hal itu dikatakannya saat kunjungan spesifik ke Rumah Sakit Siloam dan RSUD Tangerang, Kamis (4/2) meninjau pasien DBD pengguna BPJS dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Berdasarkan informasi, saat ini Virus Zika telah menyerang puluhan ribu orang 23 negara di Amerika dan Karibia. Virus ini pertama kali ditemukan di hutan Zika, Uganda, pada 1947. Hutan seluas 12 hektar itu memang dilindungi untuk penelitian ilmiah.

Ermalena mengatakan, kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus, karena Virus ini merupakan masalah yang serius. Karena itu Komisi IX berharap apa yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan lebih digencarkan lagi. Juga perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat agar terproteksi lebih baik. “Upaya preventif atau mencegah lebih baik dari pada terlanjur menjadi wabah,” ungkap politisi PPP dari Dapil NTB.

Hal senada pun disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini, yang mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan pencegahan penyebarannya, dan melakukan survey untuk mengetahui sejauh mana berkembangnya Virus Zika di Indonesia.

“Dengan demikian kita dapat memetakan dan membatasi perkembangan virus tersebut karena medianya sama

dengan nyamuk *Aedes Aegypti* nyamuk yang membawa wabah DBD dan juga berpotensi menyebarkan Virus Zika” tambah politisi Partai Nasdem.

Kedua anggota DPR ini mengharapkan ada cara tradisional mengatasi penyebaran virus Zika sebagaimana nyamuk DBD, dengan membersihkan tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk dan serangga yang diduga penyebar virus. Tidak boleh ada genangan air di pot bunga, kaleng bekas, serta menguras bak penampung air. “Kita mengenalnya dengan istilah 3M, yakni menguras, menutup, dan menguburkannya,” tambahnya. (rnm,mp), foto : jayadi/parle/hr.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena berdialog dengan salah satu pasien di RS Siloam

BANGGAR UNDANG PAKAR BAHAS UTANG NEGARA



Ketua Banggar DPR DRS H Kahar Muzakir

BADAN Anggaran (Banggar) DPR-RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar ekonomi, Kamis (4/2/16) rapat ini membahas tentang melonjaknya utang dan skema pembiayaan menuju perubahan APBN 2016. Pakar ekonomi yang dihadirkan dalam RDPU ini adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Anggito

Abimanyu dan ekonom dari IPB Noer Azam Achsani.

Bersama pakar ekonomi, anggota Banggar mencari solusi dari permasalahan utang pemerintah. Dalam RDPU yang diselenggarakan di Ruang Rapat Banggar Gedung Nusantara II ini ditemukan fakta terjadi, pendapatan negara tidak sebanding dengan pengeluarannya,



artinya ada ketimpangan di dalamnya. Sehingga untuk menutupi pengeluaran tersebut pemerintah sulit menghindari dari utang.

Anggota Bangkar DPR Hamka Baco Kady menyarankan jika pemerintah tidak bisa menghindari dari utang negara maka sebaiknya memprioritaskan utang untuk belanja modal, bukan justru utang dalam belanja barang. Hamka pun mengeluhkan dalam kurun waktu 2015 pemerintah malah mengambil tindakan yang tidak strategis dalam hal ekonomi, pemerintah lebih banyak berutang untuk memenuhi belanja barang.

"Tapi utang harus belanja modal bukan belanja barang. Namun dalam 2015 lebih banyak belanja barang," keluh anggota dewan dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I.

Saat diskusi juga disinggung tentang kebijakan pemerintah yang telah menyiapkan utang negara sekitar Rp 63 triliun. Uang sebanyak ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan

infrastruktur pada awal 2016. Sumber dana berasal dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi berbentuk valuta asing US\$ 3,5 miliar atau Rp 48 triliun dan matang uang domestik senilai Rp 14 triliun.

Hamka juga mengungkapkan, bahwa dalam postur APBN pengeluaran negara banyak yang bersifat mandatoris, sudah memiliki pijakan undang-undang yang cukup kuat sehingga sulit untuk digugat. Dia melanjutkan, untuk menghadapi permasalahan ini, politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya menganjurkan kepada pemerintah untuk berpikir kreatif agar pemasukan keuangan negara bisa proporsional dengan pengeluarannya.

"Sementara pendapatan dan penerimaan negara tidak proporsional. Saya menyarankan, pemerintah harus berpikir untuk mendapatkan penerimaan selain pajak, karena kue akan dibagi ke pada banyak sektor," ujar Hamka.

Kebijakan pre-funding atau utang lebih awal ini sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 yakni menerbitkan SUN pada akhir 2015. Tujuannya, untuk menjamin ketersediaan pendanaan pada awal tahun anggaran 2016.

RDPU yang dipimpin oleh Ketua Bangkar Kahar Muzakir ini juga membahas bagaimana merumuskan strategi kebijakan agar pemerintah mampu meningkatkan pendapatan negara, baik itu pendapatan dari sektor pajak dan sektor lainnya yang potensial.

Dalam rapat ini kedua pakar ekonomi mengungkapkan bahwa total utang pemerintah dan swasta, sesuai dengan data Bank Indonesia menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia pada semester pertama tahun lalu sebesar US\$ 303,7 miliar. Dari jumlah tersebut, utang luar negeri sektor swasta paling banyak, yakni US\$ 169,2 miliar atau 55,7 persen dari seluruh pinjaman. Adapun sisanya, US\$ 134,5 miliar, merupakan pinjaman sektor publik. (eko/iky), foto : rni/parle/hr.

PENGGUNA MIRAS DIUSULKAN DIREHABILITASI

ANGGOTA Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) DPR, Jalaluddin Rakhmat menekankan bahwa perlu ada rehabilitasi bagi pihak yang mengkonsumsi minol.

Hal itu disampaikan saat Pansus RUU Minol Rapat Dengar Pendapat dengan Kabareskrim Polri Anang Iskandar di Ruang Pansus C, Nusantara II pada Rabu (03/02).

"Perlu diketahui bahwa yang mengkonsumsi minuman keras adalah orang sakit, harusnya tidak dipenjarakan. Tetapi perlu diberikan bantuan medis.

Ketimbang anggarannya dipakai untuk pidana lebih baik untuk diberikan rehabilitasi" ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat II ini.

Sebagaimana diketahui dalam rancangan ini diatur klasifikasi jenis minuman beralkohol yang dilarang. Rencana pelarangan total produksi hingga perdagangan minol berlaku untuk minol golongan A atau dengan kadar etanol lebih dari 1% hingga 5%, golongan B dengan kandungan kadar etanol melebihi 5% hingga 20%. Kemudian golongan C, kadar etanol

melebihi dari 20% hingga 55%, dan minuman beralkohol tradisional dengan berbagai jenis nama, serta minuman beralkohol racikan.

Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin Wakil Ketua Pansus Lili Asjudiredja (F Golkar) dan didampingi oleh Aryo Djojohadikusumo (F Gerindra). Saat ini, Pansus masih akan terus mendalami secara komprehensif RUU Usul Inisiatif DPR yang mencakup 7 bab dan 22 pasal ini dengan mendengarkan masukan dari banyak pihak. (hs,mp) foto: arief/parle/hr.



Suasana rapat Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol

PANJA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT UNTUK MERESPON PROGRAM TOL LAUT DI INDONESIA

Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena dalam sambutannya mengingatkan bahwa pembentukan Panja Konektivitas Tol Laut Komisi V DPR yang dibentuk pada Mei 2015 lalu, dimaksudkan untuk merespon program pemerintah yang terkait dengan konektivitas transportasi laut di Indonesia, menggali akar permasalahan dan kelemahannya serta menganalisis strategi.

Hal tersebut dikatakan Michael saat Panja Konektivitas Transportasi Laut Komisi V DPR melakukan Rapat dengan beberapa pakar kelautan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/2).

“Implementasi output dan outcome dari program pemerintah yang terkait dengan konektivitas Tol Laut di Indonesia, sebagai salah satu bahan untuk me-review aspek keselamatan dan keamanan juga kualitas transportasi laut di Indonesia, serta roadmap zero to accident di sektor transportasi laut,” jelas Michael.

Sedangkan tujuan dibentuknya Panja Konektivitas Transportasi Laut ini, terangnya, adalah memberikan rekomendasi berupa langkah-langkah strategis yang diperlukan oleh pihak pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam hal ini, pertama, memperbaiki manajemen transportasi laut di Indonesia, kedua, meningkatkan faktor kualitas konektivitas transportasi laut melalui peningkatan kapasitas frekuensi dan jaringan transportasi laut antar pulau, wilayah dan pelabuhan sehingga mampu menurunkan biaya logistik dimasa



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena berdialog dengan Pengamat Transportasi Laut

mendatang, dan mendukung pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, tambah Michael, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, melalui kebijakan dan program yang tepat efektif dan kompetitif, keempat, memberikan prioritas bagi pengembangan moda transportasi laut, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang terintegrasi.

Kelima, meningkatkan faktor keselamatan keamanan transportasi laut dengan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan dalam

pemanfaatan perairan Indonesia, angkutan di perairan, ke pelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, navigasi, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Keenam, meningkatkan faktor kualitas dengan terpenuhinya kualitas sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan transportasi laut, baik di regulator maupun operator.

Sebagaimana diketahui, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo berencana untuk mengembangkan maritim dengan melaksanakan program Tol Laut. Tol Laut adalah sebuah sistem distribusi logistik nasional berbasis kelautan, dengan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia.

Dengan Tol Laut diharapkan terciptanya trayek yang menjamin kelancaran dan efisiensi pada arus pergerakan kapal antar pelabuhan, tujuan dari program Tol Laut ini yaitu menurunkan biaya logistik, selain itu Tol Laut juga diharapkan dapat meningkatkan volume dan transaksi perdagangan antar pulau, antar provinsi, dan antar pelabuhan.[nt](http://naefurodjie/parle/hr)), foto : naefurodjie/parle/hr.

DPR HARAPKAN KOMISIONER ORI INDEPENDEN DAN NON DISKRIMINATIF



Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman berjabat tangan dengan Pimpinan DPR

RAPAT Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon menyetujui dan mengesahkan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR. Dalam acara yang berlangsung Selasa (2/2) siang, Fadli didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F PAN), Fahri Hamzah (F PKS) dan Agus Hermanto (F Demokrat).

Dalam laporan yang disampaikan Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman disebutkan, berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon anggota ORI, akhirnya terpilih 9 (sembilan) orang. Kesembilan orang tersebut adalah Amzulian Rifai (Ketua), Lely Pelitasari Soebekty (Wakil



Ketua) dan anggota masing-masing Adrianus Eliasta Meliala, Ahmad Alamsyah Saragih, Ahmad Sua'di, Alvin Lie Ling Piao, Dadan Suparjo Suharmawijaya, Laode Ida dan Ninik Rahayu.

“Apakah laporan Komisi II tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner ORI dapat disetujui?” tanya Fadli selaku pimpinan Rapat yang disambut. “Setuju!” jawab oleh seluruh peserta Rapat Paripurna.

Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman berharap komisioner ORI terpilih dapat bekerja maksimal. “Komisi II menaruh harapan kepada komisioner ORI terpilih agar dapat

menjalankan tugas dengan maksimal dan bertanggung jawab, walaupun di tengah keterbatasan yang dimiliki oleh ORI baik dari segi anggaran, fasilitas dan sumber daya manusianya” ujar Politisi Golkar dari Dapil Sumatera Utara II ini.

“Selain itu kami juga berharap ORI dapat berpegang teguh pada independensi dan mengedepankan sikap non diskriminatif dalam menindaklanjuti laporan dugaan mal-administrasi dalam pelayanan masyarakat” paparnya. Selanjutnya sembilan nama terpilih ORI tersebut akan diserahkan kepada Presiden RI untuk segera menjalani proses pelantikan menjadi Komisioner ORI periode 2016-2021 ([hs,mp](#))/foto:tim parle/iw.

PIMPINAN DPR SERAHKAN KASUS MASINTON KE MKD



Ketua DPR Ade Komarudin didampingi Pimpinan MKD

KASUS dugaan pemukulan yang dilakukan anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu terhadap staf ahlinya, Dita Aditia, pun tak pelak mendapat perhatian Ketua DPR RI Ade Komarudin. Akom menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada mekanisme yang dimiliki dewan yakni Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Tentu MKD akan mengambil langkah-langkah,” kata Politikus Golkar itu, usai menerima Ketua MKD Surahman Hidayat (F-PKS), dan Wakil

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad (F-Gerindra), di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senin (1/06/2016).

Politisi asal daerah pemilihan Jawa Barat itu pun akan berkomunikasi dengan Fraksi PDI Perjuangan, selaku partai yang mengusung Masinton.

“Tadi saya sudah SMS. Saya akan berbicara dengan Fraksi PDI Perjuangan,” imbuh Akom.

Sementara itu, Ketua MKD Surahman Hidayat mengatakan, saat ini pihaknya menunggu proses di kepolisian.

Pasalnya, Dita dikabarkan telah melaporkan Masinton kepada Bareskrim Mabes Polri.

“Kita memantau agar tidak ketinggalan berita. Kita menunggu, biasanya kepolisian akan berkoordinasi dengan MKD,” kata Surahman. Ketika ditanya mengenai rencana pemanggilan Masinton, Surahman mengatakan hal itu sesuai dengan keterangan yang diperlukan oleh kepolisian. “Sesuai dengan proses perkara disana. Kita akan bahas di Pimpinan MKD,” tutur politikus asal dapil Jawa Barat itu.

Sebagaimana diberitakan, Masinton diduga melakukan pemukulan kepada staf ahlinya, Dita, pada 21 Januari 2016 lalu. Masinton membantah hal itu. Terdapat dua versi kronologis cerita, baik dari Masinton, maupun dari Dita.

Masinton menyatakan, kejadian bermula saat dirinya beserta staf ahli lainnya dan sopir pribadinya, menjemput Dita yang kala itu dalam kondisi mabuk berat di sebuah kafe di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, 21 Januari 2016.

Setelah sampai di tempat tersebut, Masinton menyuruh sopirnya menjemput Dita yang ada di dalam. Saat dijemput ke dalam, lanjut Masinton, Dita sudah berada dalam kondisi mabuk berat dan sempoyongan sehingga harus dipapah menuju mobil menuju Kantor DPP Partai Nasdem karena mobil Dita berada di sana.

“Sopirku yang ke dalam, dia kenal

aspriku. Datang jalan sempoyongan dipapah. Terus dia duduk depan. Sopirku duduk di sampingku, dan staf ahliku bawa mobilku. Jemput mobil dia di Kantor Nasdem. Sopirku ngambil mobilnya," beber Masinton.

Di dalam mobil, kata Masinton, Dita berteriak histeris hingga akhirnya di Jalan Otista, Jakarta Timur, perempuan tersebut menarik setir kemudi hingga akhirnya mobil oleng ke kiri. Tangannya ditepis, hingga terpentak kena wajahnya. Akibat kejadian itu, Dita terlihat mengalami luka pada mata sebelah kiri.

Sementara cerita versi Dita, bahwa saat di dalam mobil itu, ia mengaku sempat dimaki dan interogasi oleh Masinton. Setelah itu Dita yang masih berada di dalam mobil meminta tolong Husni untuk mengambil mobilnya yang diparkir di DPW NasDem. Masinton meminta Husni mengambil mobil Dita ke DPW NasDem dan menaruhnya ke rumah Dita di MTH Square, Cawang.

Saat sampai di DPW NasDem, Husni yang tadi menyetir mobil Masinton akhirnya beralih menyetir mobil Dita. Sehingga di mobil hanya ada Masinton dan Dita. Dita diajak berputar-butar sambil diinterogasi dan dimaki-maki hingga menangis dan dugaan peristiwa pemukulan pun terjadi.

Dita yang kesakitan lalu membelokkan setir ke sebelah kiri hingga mobil oleng ke kiri jalan. Dita sempat bilang ke Masinton akan melaporkan penganiayaan ini ke Polisi dan melakukan visum ke Rumah Sakit sebagai bukti. Setelah itu Dita diturunkan di dekat Cawang.

Dita sempat bertemu dengan Husni yang mau menyerahkan kunci mobil. Dita mengatakan kepada Husni kalau dia dipukul Masinton. Kemudian Dita pergi menggunakan taksi ke Polsek Jatinegara untuk membuat laporan. Di Polsek, Dita dibawa ke RSUD Budi Asih untuk menjalani visum.

Setelah itu, Dita kembali ke Polsek Jatinegara dan disarankan untuk istirahat sebelum membuat BAP dan kembali Sabtu (23/1) pukul 09.00 WIB. Namun, Dita tak kembali pada Sabtu karena dia harus menjalani rawat inap di RS Aini dari Jumat-Sabtu atau tanggal 22-24 Januari 2016. (sf)/foto:jaka/parle/iw

PEMERINTAH KELIRU TAFSIRKAN PASAL 33 UUD 45

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi maupun Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, memiliki kesalahan pemikiran terkait rencana pembangunan kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung, yang dikerjakan oleh China itu.

Menurutnya, yang paling fatal dari kesalahan tersebut adalah kekeliruan memahami makna pasal 33 UUD 1945, yang utamanya mengatur tentang perekonomian, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan rakyat, dan prinsip perekonomian nasional itu sendiri.

"Ada beberapa kesalahan pikiran Presiden Jokowi dan Meneg BUMN Rini Soemarno terkait proyek KA cepat itu. Pertama adalah kekeliruan memahami makna pasal 33 yang diturunkan menjadi berbagai UU termasuk di dalamnya UU BUMN," tegas Fahri, di Gedung Nusantara III, Senin (1/02/2016).

Menurut Fahri, makna dari pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, sudah jelas bahwa dalam penguasaan kekayaan negara adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diketahui pasal 33 ayat 2, yang berbunyi; 'Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,' dan pasal 33 ayat 3 yang berbunyi; 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Nah dalam hal ini, kerjasama empat BUMN yang tergabung dalam satu konsorsium empat dengan perusahaan China dalam hubungan Bussines to Bussines atau B to B itu jelas melanggar pasal tersebut. BUMN itu dibentuk dengan tugas utamanya menyebarkan kesejahteraan, menyalurkan kekayaan sehingga rakyat sejahtera. BUMN menjadi semacam pipa yang menyalurkan kesejahteraan pada rakyat," tegas Fahri.

Fahri menilai dalam kasus KA cepat China ini, tiba-tiba Presiden Jokowi dan Meneg BUMN, Rini Soemarno memahami pengertian pasal 33 ke sebuah

nalar seolah itu hanya bisnis semata yang dituangkan dalam kerjasama B to B.

"BUMN jelas milik negara, karena negara yang menjamin modal, eksistensi dan semua hal yang terkait BUMN," imbuh politisi asal dapil NTB itu.

Fahri juga menyoroti, bahwa infrastruktur harus diprioritaskan dengan kebutuhan masyarakat, diputuskan secara independen oleh negara, dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Tapi Fahri melihat, dalam kasus kereta cepat Jakarta Bandung itu terkesan seperti ada campur tangan pihak luar, dalam hal ini adalah pihak China.

"Dikatakan, Presiden Jokowi sering mengatakan akan mendahulukan pembangunan infrastruktur di luar Jawa untuk mendorong kemajuan ekonomi di daerah lainnya. Lah, kok sekarang mau membangun jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung yang infrastrukturnya bisa dikatakan sudah lengkap karena sudah ada kereta api, tol maupun jalan non tol maupun angkutan udara," heran Fahri.

Karena itu, lanjut Fahri, pembangunan KA cepat ini sungguh melanggar rasa keadilan masyarakat, di mana saat ini masih banyak masyarakat di daerah yang menginginkan dan membutuhkan sekedar transportasi yang layak.

"Kalaupun mau dipaksakan membangun jalur KA di pulau Jawa, maka kereta cepat Banten-Banyuwangi masih lebih tepat. Paling tidak ini akan lebih berguna mendorong pembangunan," tutup Fahri. (sf/nt), foto : jaka/parle/mr.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah





IMF DAN WB TERKESAN PADA SISTEM KONTROL DPR



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf

DELEGASI IMF dan World Bank (WB) sangat terkesan dengan sistem pengawasan dan kontrol yang dilakukan DPR RI kepada pemerintah. Dua lembaga keuangan dunia ini, juga tertarik pada sistem politik yang dianut Indonesia.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan hal tersebut usai menerima delegasi IMF dan WB di DPR, Senin (1/2). DPR, kata Nurhayati, punya peran penting mengawasi semua perjanjian dan kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah dengan pihak asing. Mekanisme ini sudah diatur dalam UU. Baik IMF dan WB menilai, mekanisme seperti itu sangat baik.

Mendengar banyak penjelasan tersebut, kedua lembaga ini ingin terus meningkatkan kerja samanya dengan Indonesia di bidang pembangunan infrastruktur. IMF dan WB juga mendapat penjelasan yang memadai seputar prioritas pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan pemerintah. Bahkan, soal kebakaran hutan dan penanganannya juga ditanyakan para delegasi kepada DPR.

“Kita bersyukur alhamdulillah, karena peran dan fungsi parlemen kita yang sangat kuat, sehingga membuat mereka (IMF dan WB) menaruh kepercayaan kepada kita. Ini merupakan kunjungan pertama mereka yang ditujukan ke Indonesia,” ujar politisi Partai Demokrat itu. (mh), foto : [jaka/parle/mr](#)

DPR TERIMA DELEGASI PARLIAMENTARY NETWORK WORLD BANK DAN IMF



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyambut Parliamentary Network World Bank & IMF

DEWAN Perwakilan Rakyat RI hari ini Senin (1/2/2016) menerima dan menyelenggarakan jamuan makan siang bagi delegasi Parliamentary Network World Bank and IMF. Delegasi yang terdiri dari 25 orang dari 17 negara tersebut tiba di Hal Gedung Nusantara disambut dengan pengalungan sraf batik oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf dan anggota BKSAP DPR. Iringan music da'i gamelan Bali mengiringi langkah delegasi memasuki Hall Gedung Nusantara DPR RI.

Jamuan makan siang dibuka dengan sambutan Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf. Dalam sambutannya Nurhayati menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara ekonomi terbesar ke delapan berdasarkan purchasing power parity dan berdasarkan data world bank 2015 Indonesia adalah negara terbesar ke 16 by GDP.

“Kami ingin masuk dalam peringkat 10 besar pada tahun 2030. Namun ini tidak mudah, banyak tantangan yang dihadapi baik dari internal maupun global,” kata Nurhayati di Hall Gedung Nusantara DPR, Jakarta.

“Kedatangan anda sudah kami tunggu

untuk melakukan diskusi secara komprehensif terkait situasi ekonomi saat ini. Selain itu, memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk bertukar pikiran mengenai prospek Indonesia yang memiliki pengaruh di regional dan global,” tambah Nurhayati.

Setelah sambutan Nurhayati, dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Ketua delegasi Parliamentary Network Alain Destexhe. Kemudian acara dilanjutkan dengan photo bersama seluruh delegasi dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf dan anggota BKSAP DPR RI.

Acara ditutup dengan jamuan makan siang dengan iringan musik dari gamelan Bali. Setelah seluruh rangkaian acara jamuan makan siang selesai, delegasi Parliamentary Network World Bank and IMF melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Hadir dalam acara tersebut anggota BKSAP Sofyan Tan (F-PDIP), Satya W. Yudha (F-PG), Aryo Djojohadikusumo, Erna Suryani Ranik dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (F-Gerindra), Okky Asokawati (F-PP), dan Hamdani (F-Nasdem). (sc), foto : [azka/parle/hr](#).

NATAL BERSAMA MPR, DPR DAN DPD KHIDMAT DAN MERIAH

Perayaan Natal bersama MPR, DPR, dan DPD RI kali ini sangat berbeda dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. “Acara Natal berlangsung dengan sukses. Baru malam hari ini sepanjang 20 tahun saya menjadi anggota DPR RI, perayaan natal bersama sangat meriah,” ucap Ketua DPR Ade Komarudin dalam sambutannya, Kamis (28/01) malam di Lapangan Sepak Bola Komplek Parlemen, Senayan.



Ketua DPR Ade Komarudin

PERINGATAN Natal yang mengangkat tema “Hidup Bersama Sebagai Keluarga Allah” sudah terlebih dahulu dipraktekkan oleh panitia dengan bekerjasama dan bergotong royong demi terwujudnya perayaan ini. Menurut Ketua Panitia Maruarar Sirait, tidak hanya sumbangan pemikiran dan tenaga tetapi juga seluruh pendanaan untuk acara Natal bersama ini dikumpulkan dari anggota MPR, DPR, DPD, Staf Ahli hingga Sekretariat.

Maruarar menegaskan, kemeriahan Natal harus menjadi momentum kebersamaan seluruh anak bangsa, bersinergi membangun kehidupan bangsa Indonesia yang bertoleransi, maju, aman

tanpa diskriminasi.

“Apapun agamanya dilindungi UUD 45 dan Pancasila, kita harus jujur, masih banyak teman kita yang kesulitan beribadah dan menyembah Tuhan yang diyakininya,” ujar Ara sapaan akrab politisi PDI Perjuangan ini.

Penasihat Perayaan Natal DPR, MPR, dan DPD EE Mangindaan turut menyampaikan bahwa peringatan kelahiran Yesus Kristus kali ini dapat dijadikan suri teladan hidup agar bisa mengasihi sesama. “Kita merupakan keluarga besar bangsa Indonesia dan keluarga besar umat Indonesia,” ujar Wakil Ketua MPR RI

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPR Ade Komarudin, kebersamaan ini

harus kita bangun, toleransi ini harus kita jaga demi persatuan nasional karena kita heterogen. “Ini amanat konstitusi kita jadi tak bisa diperdebatkan lagi,” tegasnya.

Selain para anggota parlemen, tampak juga sejumlah tokoh nasional seperti Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Pimpinan KPK Basariah Panjaitan dan Saut Situmorang, Ketua BPK Harry Azhar Aziz, Ketua OJK Muliaman D Haddad, Ketua DPD Irman Gusman, tokoh Pluralis Yenny Wahid, tokoh senior PDIP Sabam Sirait. Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena ikut menyumbang lagu pujian dan Aryo Djojohadikusumo yang turut menjadi panitia.

Yang menarik, pada acara ini beberapa tokoh agama lainnya seperti Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin) turut memeriahkan acara dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama membantu menjaga keamanan di lingkungan Parlemen selama perayaan berlangsung.

Perayaan yang meriah namun berlangsung khidmat ini dihadiri sekitar 7.000 jemaat dan menghadirkan 80 Pedangan Kaki Lima (PKL) dengan aneka kuliner khas Indonesia disajikan secara gratis. ([ann,mp/foto:tim-parle/parle/iw](https://ann.mp/foto:tim-parle/parle/iw)).

PIA DPR GELAR SEMINAR PIKUN DAN PERMASALAHANNYA

Ketua Umum PIA Netty Marliza Ade Komarudin dan Ketua Panitia Seminar Widha Rolindrawan

PIKUN atau dalam istilah kedokteran disebut demensia bisa dialami oleh siapa saja, tak terkecuali usia muda. Hal tersebut terungkap dalam seminar bertema Mengenali Pikun dan Permasalahannya yang digelar oleh Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI, Jumat (29/1) di gedung DPR RI, Senayan Jakarta.

“Awalnya ada masukan dari seorang penulis buku yang isinya mengisahkan tentang pikun. Setelah kami baca ternyata menarik juga, di mana pikun itu tidak harus jadi tua terlebih dahulu, usia muda pun bisa mengalami pikun. Dari sana timbul ide, kenapa juga PIA tidak menggelar seminar tentang pikun itu, jelas Ketua umum PIA, Netty Marliza

Ade Komarudin.

Dilanjutkannya, dengan mengetahui penyebab dan ciri-ciri pikun sejak dini, diharapkan dapat terhindar dari demensia. Jika pun kemudian hari kita tidak bisa menghindari dari kepikunan maka kita sudah dapat mengetahui cara penanganannya.

Sementara itu Ketua Panitia Seminar, Widha Rolindrawan mengatakan sangat mengapresiasi kedatangan dan pembelajaran dari para pembicara, dokter Wanarani, penulis Irna Permanasari, dan Chili Desire Sylvia sebagai caregiver penderita demensia. Hal itu terlihat dari antusias para anggota PIA yang ingin mengetahui lebih jauh tentang demensia.

Dalam penjelasannya dokter

Wanarani mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kepikunan, salah satunya lewat terapi non farmakologi. Terapi ini menurut American Psychiatric Guideline terdapat empat pendekatan, yakni pendekatan psikososial. Pendekatan ini merupakan pendekatan terapi perilaku yang berfokus pada tindakan, seperti psikoterapi yang berfokus pada emosi.

Kedua pendekatan orientasi realistik yang berfokus pada kognitif yakni lewat pelatihan ketrampilan. Ketiga merupakan terapi seni yang berfokus pada stimulus atau rangsangan. Pendekatan ke empat untuk mengatasi kepikunan adalah dengan terapi rekreasi. (Ayu)/foto:runi/parle/iw.

DELEGASI DPR GELAR PERTEMUAN BILATERAL DENGAN PARLEMEN IRAK DAN TURKI

Di sela-sela Sidang Parlemen negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI (PUIC) di Irak, Delegasi DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berkesempatan menggelar pertemuan bilateral dengan Parlemen Irak dan Parlemen Turki.

DALAM pertemuan bilateral dengan Ketua dan Wakil Ketua Parlemen Irak, beberapa hal penting yang mencuat antara lain, Indonesia menyampaikan bahwa kehadiran Delegasi Indonesia di Irak sebagai bentuk dukungan moril Indonesia

kepada Irak yang tengah melakukan konsolidasi masa transisi internalnya terutama dalam memerangi aksi terorisme ISIS.

Dukungan Indonesia kepada Irak didasarkan terutama karena Irak termasuk negara paling awal mengakui

kemerdekaan Indonesia. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dialog politik antara kedua negara harus ditingkatkan untuk ditindaklanjuti pengembangan hubungan antar-bisnis dan antar-masyarakat. Khusus dalam kerjasama antar-bisnis, Indonesia menempatkan Irak sebagai mitra strategisnya khususnya karena Irak dengan 37 juta penduduk memiliki produksi minyak sekitar 3 juta barrel per hari, sementara Indonesia dengan 270 juta penduduk memiliki produksi



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah foto bersama Parlemen Irak dan Turki

minyak kurang dari 1 juta barrel per hari.

" Oleh sebab itu, parlemen kedua negara diharapkan memainkan peran nyata dalam peningkatan dialog politik

tersebut," tegas Fahri.

Indonesia berkeinginan berbagi pengalaman kepada Irak dalam upaya konsolidasi demokrasi berbasis Islam, guna menciptakan pemerintahan yang kredibel di mata rakyat. Hal tersebut karena Indonesia dinilai sebagai negara berpenduduk Muslim yang berhasil melakukan transisi demokrasi secara stabil dan aman.

" Dalam kaitan ini, Indonesia mengundang Parlemen Irak untuk melakukan kunjungan ke Indonesia, terlebih lagi Parlemen Irak telah memiliki grup persahabatan dengan Parlemen Indonesia," tambah

politisi F-PKS ini.

Sementara dalam pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Turki, tercatat beberapa hal penting, kedua negara yang dinilai berhasil menjalankan demokrasi berbasis Islam diharapkan bersinergi untuk mengambil langkah konkrit dalam merespon situasi negara-negara Islam yang tengah terpuruk lantaran konflik yang berkepanjangan.

Parlemen Turki dan DPR, mendorong pembentukan sebuah mekanisme bilateral yang akan mewadahi pengembangan dan penguatan Islam moderat, sebagai sebuah upaya memperbaiki citra Islam yang tercoreng oleh aksi-aksi terorisme. (bksap,mp), foto : dok.bksap/parle/hr.

KOMISI VI DPR-RI menggelar rapat bersama pakar ekonomi Ichsanuddin Noorsy, di ruang Rapat Komisi VI Gedung Nusantara I, Kamis, (28/01) membahas tentang paradigma dasar RUU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua Komisi VI DPR-RI Hafisz Tohir mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap jalannya kerja BUMN masih membutuhkan regulasi yang jelas, oleh sebab itu Komisi VI mengundang Pakar Ekonomi yang konsen terhadap kajian BUMN untuk memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan.

"Kewenangan negara di bidang pengawasan BUMN belum jelas, selain itu BUMN juga membutuhkan harmonisasi dan masukan sebagai bahan pembahasan RUU BUMN," papar Hafisz.

BUMN merupakan milik negara yang pembentukannya ditetapkan dengan undang-undang, termasuk proses Penyertaan Modal Negara (PMN) karena menggunakan uang rakyat. BUMN juga termasuk organisasi hibrida karena diperbolehkan untuk mengelola dua jenis dana yang terdiri atas dana publik dari keuangan negara tersebut dan swasta.

Banyaknya peran yang harus dijalankan BUMN secara bersamaan mencerminkan negara tidak memiliki kejelasan untuk berperan seperti apa dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat.

KOMISI VI UNDANG PAKAR EKONOMI BAHAS RUU BUMN

Problem utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada masalah tata kelola (governance) dan profesionalitas. Kinerja BUMN dituntut professional.

Pakar ekonomi Ichsanuddin Noorsy dalam makalahnya yang bertajuk "Keuangan Negara vs Kekayaan Negara" menekankan tentang bagaimana caranya agar melalui pengelolaan BUMN yang baik pemerintah bisa mengangkat harkat dan martabat rakyat banyak.

Ichsanuddin yang pernah menjadi Tim Ahli Pusat Studi Kerakyatan UGM (2005-2010) ini juga mengharapkan, agar RUU BUMN yang nantinya akan memuat tentang poin negara tidak disetarakan dengan global kompeni, karena hal tersebut mengakibatkan negara tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Dia juga mengapresiasi anggota Komisi VI yang hadir dalam rapat tersebut karena merupakan bukti integritas kerja anggota dewan.

"Komisi VI memiliki komitmen menjaga ekonomi konstitusi," ungkapnya.

O l e h

karena itu, bukan hanya dukungan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan BUMN, melainkan juga konsensus baru agar BUMN menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. BUMN tidak bisa hanya menjadi alat untuk memberikan keuntungan kepada negara, tetapi juga keuntungan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(eko,mp)/foto: jaka/parle/iw.



Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir



TKA DI JATIM PERLU DIPANTAU SECARA KETAT

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Jawa Timur (Jatim) perlu dipantau secara ketat. Selain jumlahnya yang lumayan besar, para TKA kerap bekerja sembunyi-sembunyi.

Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Dinas Tenaga Kerja Jatim di Surabaya, Kamis (28/1). Kadis Naker, Transmigrasi, dan Kependudukan Jatim Sukardo mengungkapkan, TKA yang bekerja secara ilegal umumnya dari Cina.

Data Kemenakertrans, TKA yang masuk ke Jatim tercatat ada sekitar 34 ribu. Namun, yang melakukan perpanjangan

lewat IMTA di Jatim hanya 1.434 pekerja. Komisi IX mengimbau Disnaker Jatim untuk menginventarisir data TKA secara akurat.

Kadisnaker Sukardo juga mengungkapkan, **b a n y a k**



Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago

perusahaan yang menyembunyikan TKA. Misalnya, jumlah yang diinformasikan perusahaan ke Disnaker ada 3 TKA. Tapi, sebenarnya ada 10 TKA yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kasus seperti ini mengundang keprihatinan Komisi IX. Idealnya, TKA yang bekerja di Indonesia harus mempunyai skill khusus. Anggota Komisi IX Irma Suryani, Imam Suroso, dan Okki Asokawati menyuarakan yang sama agar keberadaan TKA di Jatim diawasi secara ketat, apalagi dalam pemberlakuan MEA seperti saat ini.

Pertemuan dengan Disnaker Jatim ini merupakan bagian dari kunjungan kerja spesifik untuk mengetahui data PHK dan TKA di Jatim. Tim Kunker ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Asman Abnur (F-PAN). (mh), [foto : husein@parle/hr](mailto:husein@parle/hr).

KOMISI IX SOROTI KASUS PHK DI JATIM

Perlambatan ekonomi yang terjadi tahun lalu berakibat pula pada tingginya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah. Jawa Timur (Jatim) jadi salah satu daerah yang tinggi angka PHK-nya.

KOMISI IX DPR RI mengunjungi Provinsi Jatim sebagai salah satu sample tingginya angka PHK di daerah, pada Kamis (28/1). Dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Asman Abnur (F-PAN), tim Komisi IX mendapati 7.562 kasus PHK di Jatim.

Data dari Kemenaker tersebut menjadi sorotan Komisi IX yang berkunjung ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Jatim di Surabaya. Angka PHK di Jatim itu merupakan tertinggi kedua setelah Kaltim yang mencapai 10.721 kasus. Perlambatan ekonomi membuat sejumlah perusahaan menurunkan produksi hingga menghentikan produksinya sama sekali.

PHK menjadi dampak ikutan dari situasi perekonomian tersebut. Kadisnaker Jatim Sukardo mengakui, angka PHK tersebut cukup tinggi dan menjadi keprihatinan bersama.

Apalagi saat ini sedang diberlakukan MEA, menjadikan persaingan tenaga kerja kian tak terkendali. Para pekerja lokal bersaing dengan pekerja asing di Jatim yang angkanya juga cukup tinggi, mencapai 1.434.

Kabupaten Jombang menempati urutan pertama di Jatim yang angka PHK-nya tertinggi, yaitu 1.520 pekerja. Disusul Probolinggo dengan 1.493 pekerja yang terkena PHK.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Asman Abnur didampingi Kadisnaker Jawa Timur Sukardo

Tim Komisi IX yang turut serta dalam kunjungan kerja kali ini adalah Alex Indra Lukman, Ribka Tjiptaning, Imam Suroso, Charles J. Mesang, Andi Fauziah, Robert Rouw, Sri Wulan, Siti Mufattahah, Ayub Khan, Verna Gladies, Ali Taher, Hang Ali Saputra, Ansory Siregar, Nihayatul Wafiroh, Okky Asokawati, Irgan Chairul Mahfiz, Irma Chaniago, Amelia Anggraini, dan Djoni Rolindrawan. (mh), [foto : husein@parle/hr](mailto:husein@parle/hr).

PANJA PERFILMAN KOMISI X HIMPUN MASUKAN DARI STASIUN TV

Panitia kerja (Panja) Perfilman Komisi X DPR RI, Kamis (28/1) menjaring aspirasi dari berbagai pelaku industri perfilman tanah air, termasuk dari insan pertelevisian.



Panja Perfilman Komisi X DPR kunjungi Pihak NET TV

“Film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional, untuk itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman nasional. Selama ini Komisi X menilai implementasi UU NO.33 Tahun 2009 tentang perfilman masih menemui kendala. Hal itu terlihat dari sedikitnya jumlah produksi film nasional yang berkualitas. Nah, kami ingin mengetahui kendala apa saja yang ditemui pelaku industri perfilman tanah air,” ucap Ketua Panja Perfilman Komisi X DPR, Abdul

Kharis Almasyhari dalam pertemuan dengan Direksi Net TV beserta jajarannya.

Dilanjutkan Abdul Kharis, televisi sebagai salah satu media yang secara tidak langsung turut berperan dalam perkembangan industri perfilman tanah air. Atas dasar itulah Panja berharap masukan dari stasiun televisi untuk revisi Undang-undang Perfilman ke depan.

Menanggapi hal itu Direktur Net TV, Deddy Sudarjanto mengatakan meski Net TV bukan merupakan pelaku dalam industri perfilman tanah air, namun berdasarkan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, ia menilai kendala yang

dihadapi industri perfilman diantaranya masalah permodalan dan regulasi.

“Berdasarkan pengalaman kami sebelumnya dalam industri film, kami melihat masalah permodalan menjadi kendala utama para produser Indonesia, terutama produser pemula dengan modal yang masih sangat minim. Selain itu ada regulasi yang harus diubah, seperti permasalahan pajak. Ini sangat memberatkan para produser, terlebih lagi ketika film yang diproduksinya kurang banyak penontonnya,” ungkap Deddy Sudarjanto dari Net TV.

Oleh karena itu Deddy berharap pemerintah dapat mengizinkan modal asing untuk ikut berperan dalam perfilman tanah air. Tidak hanya itu, ia juga berharap untuk film dengan jumlah penonton di bawah satu juta agar dibebaskan dari pajak.

Sebaliknya anggota Panja Perfilman Komisi X, Reni Marlinawati menilai masuknya modal asing malah akan menurunkan bahkan mematikan perfilman tanah air. Karena para pemodal asing itu pastinya akan memproduksi film sesuai dengan keinginannya, dan akan menomerduakan film atau budaya asli Indonesia.

“Kalau permodalan asing dibuka luas, apa mungkin lantas mereka mau membangun gedung bioskop di pelosok-pelosok. Saya malah khawatir mereka malah akan membuat film sesuai kemauan mereka. ‘Ini kan modal saya, dan rumah saya, jadi saya boleh dong mengisi apa saja yang saya mau’. Kalau sudah demikian, perfilman kita pasti akan semakin menurun,” jelas Reni. (Ayu), foto : [rahayu/parle/hr](#).

APFI TOLAK RENCANA DNI

ASOSIASI perusahaan film Indonesia (APFI) menolak rencana dibukanya DNI (Daftar negative investasi). Hal tersebut diungkapkan Ram Soraya dari rumah produksi Soraya Intercine dan Chand

Parwez dari rumah produksi Starvision kepada Panja Perfilman Komisi X DPR RI saat mengunjungi rumah produksi (production house) Soraya Intercine, Kamis (28/1).

“Kami ingin memperbaiki tata kelola perfilman. Karena potensi ekonomi kreatif termasuk perfilman akan terbuka banyak lapangan pekerjaan, akan menghasilkan pendapatan negara. Dengan ekonomi



kreatif termasuk perfilman akan membuat budaya bangsa kita semakin dikenal dunia. Melihat pentingnya hal itu, negara harus hadir dalam industri perfilman nasional. Untuk itulah kami sengaja melakukan kunjungan langsung ke rumah produksi, salah satunya ke Soraya Intercine ini," ujar Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya.

Pada kesempatan itu, Pengusaha dan produser film, Ram Soraya sangat mengapresiasi maksud dan tujuan DPR membentuk panitia kerja (Panja) perfilman. Hal ini menunjukkan kepedulian DPR terhadap masyarakat luas, termasuk industri perfilman tanah air.

Selain itu keduanya juga menyampaikan permasalahan perpajakan yang diwajibkan bagi para produser. Tidak hanya itu, Chand juga mengungkapkan penolakannya terhadap rencana dibukanya DNI (daftar negative investasi) untuk perfilman nasional. Dalam membuat produksi film, Ram dan Chand mengaku bahwa produser film dalam negeri cukup mampu dalam hal permodalan. Sehingga tidak membutuhkan pemodal asing.

"Dalam eksibisi, kami juga tidak membutuhkan. Begitupun dalam

pendistribusian yang malah akan membuka *conflik of interest* diantara mereka. Karena ditanya DPR sebagai wakil kami, maka kami berani menyampaikan keberatan ini," ungkap Chand Parwez.

Menanggapi hal tersebut, Riefky mengaku bahwa ini pertama kalinya Panja

yang setuju dengan rencana pembukaan DNI itu. Biar akses dana tersebar ke produser-produser lain yang memiliki dana yang tidak besar. Kalau terkait eksibisi, kalau pemodal asing itu berani membuka bioskop didesa-desa memang sangat bagus, tapi kenyataannya mereka malah membuka

bioskop berdampingan dengan bioskop yang sudah ada. Ini kana malah akan mematikan yang sudah ada," papar Riefky.

Oleh karena itu Riefky bersama ketua Panja Perfilman, Abdul Kharis dan beberapa anggota Panja Perfilman Komisi X lainnya, seperti Reni Marlinawati, Popong Otje Djunjunan, Anang Hermansyah, Sofyan Tan, Krisna Mukti, Dadang Rusdiana yang ikut dalam pertemuan tersebut sepakat

untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait rencana pemerintah membuka DNI. Mereka sepakat untuk menampung berbagai aspirasi terlebih dahulu, untuk kemudian dicari solusi terbaik bagi semua pelaku industri perfilman tanah air, dan bagi negara. (Ayu), foto : ayu/parle/hr.



Foto bersama Panja Perfilman Komisi X DPR dan Rumah Produksi Soraya Intercine

Perfilman Komisi X DPR mendengar langsung penolakan rencana pembukaan DNI langsung dari pengusaha dan produser film. Meski sebelumnya, ia kerap mengetahui dari media massa.

"Ini baru kami dengar secara langsung penolakan DNI. Sebelumnya hanya di media-media. Kami juga mendengar ada

KETUA BKSAP DPR GAGAS PERTEMUAN PARLEMEN PEREMPUAN APPF



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf

PERTEMUAN tahunan ke-24 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) tahun ini di Vancouver, Kanada mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya APPF menggelar pertemuan khusus anggota parlemen perempuan negara-negara anggota APPF. Lebih dari 30 anggota parlemen perempuan dari 21 negara anggota dan

observer hadir dalam pertemuan tersebut.

Indonesia memegang peran penting dalam mencetak sejarah baru APPF. Nurhayati Ali Assegaf, Ketua BKSAP DPR RI, merupakan penggagas inisiatif tersebut tahun lalu pada pertemuan Komite Eksekutif APPF di Quito. Gagasan tersebut disambut baik oleh Kanada yang menjadi tuan rumah pertemuan berikutnya. Sehari sebelum pertemuan, Nurhayati Ali Assegaf mengadakan preparatory meeting dengan tuan rumah untuk melakukan finalisasi dan membahas konsep rekomendasi yang akan diajukan ke Komite Eksekutif untuk disahkan pada rapat paripurna APPF.

Sebelumnya BKSAP DPR RI dan Parlemen Kanada melakukan komunikasi dan koordinasi persiapan sidang selama tiga bulan melalui media online.

Pertemuan diadakan pada hari Minggu, 17 Januari 2016 lalu di Vancouver. Nurhayati Ali Assegaf memimpin bersama-sama dengan Senator Mobina Jaffer dari negara bagian British Columbia. Pada saat memimpin sidang, Nurhayati menyampaikan usulan untuk membuat pertemuan ini menjadi badan permanen APPF.

“Saya memiliki keprihatinan mendalam karena setelah lebih dari 20 tahun berdiri, komposisi APPF masih belum mampu menunjukkan keterwakilan gender. Baik dalam komposisi delegasi maupun di Komite Eksekutif. Dengan demikian, maka isu-isu keterwakilan perempuan dapat lebih mewarnai

kerja dan hasil-hasil APPF,” ujarnya

Berbagai isu yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut menyangkut peran perempuan dalam kehidupan politik dan pengambil keputusan serta kepemimpinan dalam kepemimpinan perempuan dalam mitigasi bencana. Delegasi DPR RI yang hadir dalam kesempatan tersebut, Irine Yusiana Roba Putri, menyampaikan peran perempuan selayaknya tidak diukur melalui keterwakilan dalam angka. Kuota 30 persen perempuan di Parlemen hanya langkah awal. Tetapi yang lebih signifikan adalah merefleksikan keterwakilan melalui kualitas UU dan anggaran sensitif gender.

Mengenai kepemimpinan perempuan dalam mitigasi bencana, delegasi DPR RI, Dwi Aroem Hadiatie menyampaikan bahwa peran perempuan tidak hanya dalam lima tahap mitigasi bencana saja. Dengan program peningkatan kapasitas

yang sesuai, peran domestik dalam mengatur rumah tangga dapat diberdayakan untuk pencegahan bencana.

Indonesia mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi dari APPF. Apresiasi tersebut dituangkan dalam joint communique. Ini menjadi capaian tersendiri mengingat hal tersebut jarang terjadi di forum ini. Pertemuan ditutup dengan rekomendasi untuk menjadikan Women Parliamentarian Meeting ini sebagai agenda tahunan APPF.

Fiji sebagai tuan rumah selanjutnya telah menyampaikan komitmen untuk menggelar pertemuan ini dengan perubahan rule of procedure untuk mengakomodasi keterwakilan perempuan di Komite Eksekutif sebagai salah satu agenda. ([bksap/mp](#)), [foto : dok.bksap/parle/hr](#).



Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi

KEBIJAKAN yang diputuskan pemerintah dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyerapan jagung lokal.

Namun lanjutnya, kebijakan itu tidak menguntungkan peternak unggas terutama wilayah Jawa Barat dan Banten yang masih menggunakan jagung impor sebesar 72 persen dan 64 persen dari kebutuhan.

PENGENDALIAN IMPOR JAGUNG RUGIKAN PETERNAK UNGGAS

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, pada tahun 2015, Kementerian Pertanian mengambil kebijakan untuk mengendalikan impor jagung dan mendorong peningkatan ekspor jagung terutama berasal dari Sumbawa dan Gorontalo.

“Karena itu Komisi IV DPR meminta penjelasan kepada Ketua Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia terkait dengan permasalahan tersebut,” kata Viva di Gedung DPR, Kamis (28/1).

Lebih lanjut Pimpinan Komisi IV dari Fraksi PAN ini mengatakan, dengan kondisi itu pemerintah melalui Kementerian perindustrian memutuskan tahun 2016 akan mengimpor jagung sebanyak 2,4 juta ton untuk kebutuhan pakan ternak dan direalisasikan secara bertahap sebanyak 200 ribu ton setiap bulannya.

Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Gabungan Makanan Ternak Indonesia Sudirman mengatakan, naiknya harga

jagung yang luar biasa karena pemerintah yang menghentikan impor secara tiba-tiba.

“Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah tidak boleh mementingkan satu sisi saja, artinya tidak boleh mementingkan petani. Kepentingan konsumen, dan pedagang perlu diperhatikan agar bisnis juga tetap bisa berjalan dengan baik,” kata Sudirman.

“Menteri Pertanian yang menuduh pabrik pakan tidak mau membeli jagung petani sehingga jagung petani harganya jatuh. Pernyataan ini yang selalu diulang-ulang oleh Menteri Pertanian, padahal hal ini tidak benar,” tandas Sudirman. ([spy,mp](#))/[foto:naefurodji/parle/iw](#).



KEPUTUSAN MA LEBIH TINGGI DARI SK MENKUMHAM



Anggota DPR Dimiyati Natakusumah (F-PPP)

MENCARI solusi bukan dengan otot tapi dengan otak. Harus diingat, Indonesia adalah negara hukum, dengan begitu hukum di atas segalanya. Hal tersebut diungkapkan politisi PPP Dimiyati Natakusumah saat Diskusi Publik bertajuk Konflik PPP: Perspektif hukum dan Politik yang digelar Fraksi PPP DPR RI, Selasa (27/1).

“Kita telah sepakat jika jalan kekeluargaan tidak ditemukan solusi dari persoalan yang ada, maka kita sepakat untuk membawa segala persoalan ke jalur hukum,”ungkap Dimiyati yang juga menjabat sebagai Sekjen PPP.

Sementara itu ahli hukum dan tata negara, Irman Putra Sidin yang ikut menjadi pembicara mengatakan bahwa

kepengurusan PPP atau partai politik yang sah adalah yang sesuai dengan AD/ART Partai tersebut. Ini sudah terkonfirmasi dengan lembaga-lembaga hukum yang ada, yakni lewat putusan kekuasaan kehakiman.

“Keputusan Mahkamah Agung (MA) merupakan tertinggi dalam produk kehakiman. Ini lebih tinggi dari Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham) yang merupakan rezim pemerintah. Dengan kata lain keputusan MA adalah sah,”papar Irman.

Ditambahkannya, segala keputusan kehakiman itu dianggap benar selama belum ada keputusan lain yang lebih tinggi, dan keputusan MA merupakan yang tertinggi. Oleh karena itu harus ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga lainnya. Ini akan jadi preseden buruk jika rezim pemerintah ikut campur dalam urusan internal partai politik.

“Kalau ada keputusan *inkracht*, mau digoreng-goreng lagi ya tidak bisa. Semua harus mentaati ini, kalau memang dikatakan negara ini adalah negara hukum,”pungkasnya.

Dengan demikian Irman menyarankan agar konflik parpol (PPP) langsung diklirkan saja. Rezim pemerintah tidak perlu dilibatkan lagi dalam keputusan partai. (Ayu)

KOMISI VIII TETAPKAN DEFINISI DAN RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

PANJA RUU tentang Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR RI berhasil membuat kemajuan penting dalam rapat pembahasan dengan pemerintah. Poin penting yang berhasil disepakati adalah tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas.

“Penyandang disabilitas adalah orang yang menyandang ada sejumlah keterbatasan yang berkaitan dengan interaksinya dengan lingkungan, dan dia mengalami kesulitan dalam berinteraksi,” kata Ledia Hanifa, setelah Rapat Panja Komisi VIII dengan Kementerian Sosial,

di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Kamis (28/1/16).

Politisi Fraksi PKS ini menajelaskan penyandang disabilitas itu menyandang dalam jangka waktu lama, tetapi penetapannya bukan berarti harus menunggu dalam jangka waktu tertentu hingga ditetapkan sebagai penyandang disabilitas.

“Justru kita (Komisi VIII) meminta ada penetapan oleh tenaga medis yang secara langsung dia ditetapkan, kalau ternyata penyebab penyandang disabilitas mendadak, berarti harus saat itu juga

ditetapkan oleh tenaga medis,” ujar dia.

Lebih lanjut, Ledia menjelaskan ragam penyandang disabilitas, bahwa ada empat kategori yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

“Kenapa kita membuat harus empat, karena nanti akan selalu ada perkembangan-perkembangan, atau temuan-temuan terbaru yang membuat kita harus menampung semua kondisi itu,” paparnya. (as/iky), foto : eno/parle/hr.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa

KOMISI I RAPAT PERDANA DENGAN BAKAMLA

Komisi I DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sebelumnya lembaga ini disebut Bakorkamla tetapi pasca disahkannya UU tentang Kelautan, organisasi ini lahir kembali dan dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 178/2014.



Anggota Komisi I DPR Ida Fauziah

SAYA menyambut baik Bakamla sebagai mitra kerja Komisi I. Keberadaan langsung di bawah presiden kita harap Bakamla bisa menghadirkan efek getar

yang kuat bagi siapa saja yang ingin mengganggu kekayaan laut kita karena potensi kerugiannya mencapai Rp240 triliun/tahun,” kata anggota Komisi I Ida Fauziah saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1/16).

Politisi Fraksi Kebangkitan Bangsa ini meminta Bakamla meyakinkan Komisi I tentang anggaran tahun 2016 sebesar Rp335 miliar lebih, memang pantas ditambah dalam APBN Perubahan sebesar Rp2,5 triliun. Ia menekankan perlu waktu untuk mempelajari anggaran Bakamla yang sebelumnya disahkan berbarengan dengan anggaran Menkopolkam.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menyampaikan catatan kritis tentang eksistensi Bakamla yang menurutnya bertabrakan dengan fungsi TNI. Ia menekankan sebelum melangkah lebih jauh dasar berpijak Bakamla harus

diperjelas.

“Bakamla lahir dengan Perpres 178 kemudian diperkuat lagi dengan Perpres 115 sehingga menimbulkan kerancuan. Bagaimana bisa kekuatan militer bisa di bawah kendali sipil - Menteri Kelautan dan Perikanan. Presiden paham tidak mengeluarkan Perpres seperti ini,” tandas dia.

Kepala Bakamla Laksamana Madya Maritim Desi Albert Mamahit menjelaskan penataan organisasi yang dipimpinnya masih terus berlangsung. Baginya Bakamla bisa dikatakan sebagai embrio lahirnya Indonesian *Coast Guard*. Sebagai pembanding menurutnya di AS kekuatan ini berkembang menjadi angkatan kelima, sedangkan di Jepang sebagai kekuatan sipil yang diberi kewenangan menggunakan senjata. (iky), foto : riska/parle/hr.

WAKIL Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan mengingatkan Pemerintah agar jangan melupakan potensi peternakan lokal atau dalam negeri, khususnya untuk pasokan daging. Dengan kebutuhan daging sapi nasional yang masih tinggi, yang sebagian juga impor, diharapkan Pemerintah tetap mengembangkan peternakan lokal.

“Kita memiliki ratusan juta penduduk, kita dukung langkah Pemerintah (untuk impor daging sapi). Karena kita berada dalam era globalisasi, kita bebas memilih (negara importir daging sapi). Kan kita tidak bisa menutup diri juga. Tapi kita jangan melupakan potensi peternakan lokal yang juga harus dikembangkan,” kata Taufik, di Gedung Nusantara III, Kamis (28/01/2016).

Politisi F-PAN itu tidak memungkir, kebutuhan bahan baku, khususnya daging

PEMERINTAH JANGAN LUPAKAN POTENSI PETERNAKAN LOKAL



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan



sapi merupakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Sangat disayangkan, kebutuhan ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh peternakan lokal. Ia berharap, posisi strategis secara geografis, Indonesia jangan hanya dijadikan market.

“Dengan posisi kita yang strategis, kita menjadi lalu lintas perdagangan barang dan jasa. Antara Asia dan Australia dan negara-negara yang membutuhkan aspek barang dan jasa. Kita harus bisa memberikan posisi bargaining yang kuat,” pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Pernyataan Taufik ini menanggapi paket kebijakan ekonomi IX yang dluncurkan Pemerintah pada Rabu (27/01/2016) lalu. Paket ini, salah satunya terfokus pada kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal

tertentu. Kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2016 ini, misalnya, kebutuhan nasional adalah 2,61 perkapita sehingga kebutuhan nasional setahun mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi. Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri, karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri. Antara lain

melalui upaya peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

Mengingat terbatasnya jumlah negara pemasok, pemerintah Indonesia perlu memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan, yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE), untuk menambah alternatif sumber penyediaan hewan dan produk hewan.

Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilisasi pasokan daging dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan kesejahteraan peternak tetap meningkat. (sf), foto : andri/parle/hr.

FADEL MUHAMMAD GANTIKAN SATYA DI KOMISI VII DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto hari ini, Kamis (28/1/2016) mengukuhkan pergantian Pimpinan Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto bersama Pimpinan Komisi VII DPR

WAKIL Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar tadinya dijabat Satya W. Yudha, digantikan Fadel Muhammad yang sebelumnya menjabat Ketua Komisi XI.

Menurut Agus, dalam Rapat Intern

Komisi VII tersebut, pergantian pimpinan ini berdasarkan surat dari Fraksi Partai Golkar tentang penetapan susunan dan keanggotaan anggota Fraksi Partai Golkar di Alat Kelengkapan Dewan.

“Kami berharap, Komisi VII dapat

meningkatkan kinerjanya dan lebih cepat menyelesaikan seluruh pekerjaan. Terutama target legislasi yang sudah ditetapkan DPR tahun ini sebanyak 40 RUU dapat terlaksana. Dan kami yakin di Komisi VII juga ada UU yang harus diselesaikan.

Mudah-mudahan dengan bertambahnya Pak Fadel, insya Allah seluruh pekerjaan Komisi VII betul-betul bisa diselesaikan terutama dalam target legislasi demikian juga masalah yang berkaitan dengan energi insya Allah bisa kita selesaikan antara lain masalah energi, Freeport, dan lain sebagainya,” papar Agus setelah pengukuhan Fadel di Gedung DPR RI, Jakarta.

Sementara, Fadel Muhammad menyatakan akan meneruskan apa yang sudah dikerjakan Komisi VII. “Kemudian kita akan bersama-sama memilih dan memilah mana yang lebih utama terutama masalah kebijakan energi, setelah itu masalah yang berhubungan dengan legislasi yaitu UU Minerba dan UU Migas akan kita kebut,” kata Fadel.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mengucapkan selamat datang kepada Fadel Muhammad. “Selamat datang Pak Fadel, sebelumnya kami sudah bermitra di Komisi XI. Dan terkait legislasi sudah diputuskan dalam prolegnas di paripurna bahwa ada dua yaitu RUU Migas dan RUU Minerba. Kehadiran Pak Fadel akan menambah semangat Komisi VII untuk menyelesaikan UU ini di tahun 2016,” tandasnya. (sc)/foto:jaka/parle/iw.

KOMISI VII MINTA PLN BERANTAS MAFIA PROYEK LISTRIK



Anggota Komisi VII DPR Muhammad Nasir

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mempertanyakan informasi yang diterimanya tentang proses lelang tender penyediaan barang dan jasa PT PLN yang masih diwarnai permainan tidak sehat walaupun sudah berlangsung secara online. Ia menyebut adanya mafia pemburu rente dalam proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang tengah dikerjakan PT PLN. Modusnya, mereka mengikuti tender lelang proyek, setelah menang kontraknya dijual kepada pihak lain.

"Yang saya dengar di PLN itu semua lelang *online*. Tapi yang terjadi di bawah banyak mafia. Karena lelang *online* masih bisa dipertandingkan," paparnya dalam rapat dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirjen Minerba dan Dirut Utama PT PLN (Persero) di Gedung

DPR, Senayan, Jakarta, Kamis(28/01/16).

Anggota komisi yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, ini meminta agar Direktur Utama PLN Sofyan Basir dapat membeberkan data para pemenang lelang proyek pembangkit listrik. Dia tidak menginginkan, para pemenang lelang tersebut kemudian hanya menjadi calo proyek dan merugikan Indonesia.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Riau II ini meminta pemerintah dan PLN memberikan perhatian pada kondisi ini. "Karena saya tahu PLN enggak mau ambil pusing yang penting proposalnya jelas, lengkap. Kadang mereka hanya jadi

calo. Itu yang terjadi," keluh Nasir yang juga seorang pengusaha dan aktif di asosiasi industri perkebunan dan peternakan.

Senada dengan Nasir, anggota Komisi VII DPR RI Harry Purnomo mengharapkan agar Dirjen Ketenagalistrikan dapat membuka data investor yang menjadi pemenang lelang proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

"Kalau ada kegagalan kinerja investor itu yang rugi kita juga. Tadi Dirut PLN banyak mengulas produktivitas investor. Tapi kami enggak pernah tahu yang terpilih siapa investornya," pungkask dia. (eko/iky), foto : jaka nugraha/parle.



TATA KELOLA ANGGARAN PT PELINDO II MELANGGAR UU



Anggota Pansus Angket Pelindo II Irmadi Lubis

ANGGOTA Pansus Angket Pelindo II DPR RI, Irmadi Lubis menilai pengelolaan anggaran PT Pelindo II tidak transparan dan melanggar etika keuangan negara. Ia menyebut patut diduga telah terjadi pelanggaran UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pada pasal 3.

“Direksi Pelindo II telah menganggap perusahaannya seperti kepemilikan swasta! Ini bersebrangan dengan etika keuangan negara yang seharusnya dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” katanya saat rapat dengan Dani Rusli mantan Dirut PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Rabu (27/1/16).

Politisi Fraksi PDIP ini menambahkan pansus perlu mengkonfrontir Menteri Perhubungan dengan Direksi Pelindo untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. “Saya usulkan kita patut segera pertemukan Menteri Perhubungan dengan

Direksi Pelindo,” tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut I ini.

Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka menanggapi positif usulan tersebut. Ia segera memerintahkan sekretariat pansus untuk segera mengatur jadwal sidang kedua pihak terkait.

Rapat dengar pendapat umum Pansus Angket Pelindo II selain menghadirkan Dani Rusli juga mengundang manajemen perusahaan PSA Singapura, Mitsui dan Oversight Committee. ([hs/iky](#)), foto : [arief rachman/parle/hr](#).



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyerahkan palu sidang kepada Ahmadi Noor Supit

AHMADI NOOR SUPIT JADI KETUA KOMISI XI

Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmadi Noor Supit menggantikan Fadel Muhammad sebagai Ketua Komisi XI DPR. Kini, sudah terjadi dua kali pergantian pimpinan di Komisi XI. Sebelumnya, Soepriyatno (F-Gerindra)

menggantikan Gus Irawan sebagai Wakil Ketua Komisi XI.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Senin (25/1) melantik Supit di hadapan pimpinan dan anggota Komisi XI lainnya. Setelah lama memimpin Banggar, Komisi XI mendapat tambahan

energi dari sosok Supit, kata Taufik. Hadir dalam pelantikan tersebut, tiga Wakil Ketua Komisi XI masing-masing M. Prakosa, Soepriyatno, dan Marwan Cik Hasan.

Supit sendiri dalam sambutannya usai dilantik, mengatakan, sejak pertama kali menjadi Anggota DPR tahun 1992, ia

selalu berada di komisi keuangan dan perbankan. Waktu itu, tahun 1992, komisi keuangan masih menjadi Komisi VII. Dan ia pernah menjadi anggotanya. “Tanpa dukungan dan kebersamaan, kita tidak bisa bekerja,” ujar Supit dalam sambutannya. (mh)/foto:arief/parle/iw.

SISTEM KEAMANAN GEDUNG PARLEMEN MASIH LEMAH

Menindaklanjuti pembahasan Sistem Keamanan Terpadu di komplek Parlemen, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima masukan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

“LINGKUNGAN DPR ini adalah salah satu objek vital nasional, tempat berkantornya wakil rakyat dan tempat berlangsungnya pengambilan keputusan kebijakan nasional bersama Pemerintah,” papar Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo saat memimpin

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Paspampres di Gedung Nusantara 1, Rabu (27/01).

Menurutnya, sistem peningkatan sistem keamanan di Komplek Parlemen menjadi hal yang penting karena merupakan salah satu objek vital nasional. Saat ini sistem keamanan yang ada di DPR salah satu yang terlemah diantara lembaga – lembaga negara lainnya.

“Berdasarkan hasil kajian Mabes Polri, sistem keamanan gedung DPR ini memang jauh dari standar,” jelas Firman.

Senada diungkapkan Purwito Hadi Wardono. Dikatakannya, sistem

keamanan di Komplek Parlemen masih sangat minim.

“Kami melihat sistem pengamanan di DPR masih lemah. Jujur saja kami bawa senjata di mobil tapi dengan mudahnya kami bisa masuk,” ungkap Asisten Intelijen (Asintel) Paspampres ini.

Untuk itu dia mengusulkan beberapa cara yang dapat dilakukan. Sistem Keamanan di DPR, MPR, dan DPD ini harus terintegrasi satu dengan yang lain. Selain itu, harus jelas pihak mana yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengamanan di lingkungan ini, apakah dari DPD, DPR atau MPR.

Selanjutnya, kata Purwito, penentuan klasifikasi wilayah menjadi daerah umum dan daerah terbatas mengingat sekitar 9.000 orang yang tiap harinya berkantor di komplek parlemen ini. Di sisi lain, pengklasifikasian personel terkait *security clearance* yang dapat diterapkan di DPR RI lewat peraturan serta struktur organisasi pengamanan dan menempatkan personel di lokasi rawan.

“Kemudian ketentuan terkait buka dan tutup akses masuk ke lingkungan DPR RI terdapat 15 pintu masuk sehingga dengan mudahnya orang masuk. Kalau di tempat kami (istana) memang harus ada pintu yang terseleksi,” lanjut Purwito dengan menambahkan, teknis pemisahannya bisa dibagi menjadi pintu masuk anggota dewan, karyawan, tamu dan pers.

Menanggapi hal itu, Firman menegaskan bahwa peningkatan sistem keamanan di Parlemen ini tidak akan menjauhkan para wakil rakyat dengan konstituenya. “Sistem yang akan kita bangun berbeda dengan Istana Kepresidenan karena platformnya berbeda. Istana merupakan simbol negara dan DPR adalah rumah rakyat,” tegas politisi Golkar tersebut. (ann,mp)/foto:jayadi/parle/iw.



Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo



KAHAR MUZAKIR GANTIKAN AHMADI NOOR SUPIT SEBAGAI KETUA BANGGAR



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bersama Pimpinan Banggar DPR

FRAKSI Partai Golkar melakukan mutasi anggotanya di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kahar Muzakir yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan, mendapat amanah memimpin Alat Kelengkapan

Dewan (AKD) yang menggodok anggaran pendapatan dan belanja negara ini.

Rapat pleno penetapan pimpinan baru Banggar ini dipimpin oleh Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan

(KOREKKU). Penetapan berlangsung mulus, tidak ada suara penolakan dari peserta sidang.

"Apakah pergantian ketua Banggar dari Ahmadi Noor Supit menjadi Kahar Muzakir dapat disetujui?" tanya Taufik. "Setuju!" jawab seluruh anggota Banggar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/01/16).

Dalam sambutannya, Kahar mengatakan akan menjalankan tugas dan fungsinya secara konstitusional. "Bismillah, terimakasih telah melaksanakan pelantikan pada hari ini. Tak ada kata lain selain ucapan terima kasih dan kami mengharapkan dukungan serta kerjasamanya sehingga bisa menjalankan tugas konstitusional dalam memimpin banggar." ujar dia.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto melakukan pergantian anggotanya pada sejumlah AKD. Disamping Banggar, ia juga mengganti Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dengan Bambang Soesatyo dan Ketua Komisi XI Fadel Muhammad digeser sebagai Wakil Ketua Komisi VII. Posisi Fadel digantikan oleh Ahmadi Noor Supit. ([hs/iky](https://www.iky.com))/foto:andri/parle/iw.

WAKIL Ketua DPR-RI Fahri Hamzah meresmikan pergatian keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) Kahar Muzakir dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I oleh Saiful Bahri Ruray dari daerah pemilihan Maluku Utara. Pelantikan anggota MKD baru tersebut sekaligus membuka masa sidang baru MKD di tahun 2016.

Saiful Bahri yang diminta tanggapannya terkait pengangkatan dirinya sebagai anggota sekaligus Wakil Ketua MKD baru, berkomentar masih menunggu sidang selanjutnya. Pasalnya pada rapat perdana di masa sidang III tahun 2015/2016 MKD belum membahas tentang program internal. Rencananya sidang MKD akan dilakukan kembali pada Kamis 14 Januari 2016.

Dalam sambutannya, Fahri Hamzah mengharapkan agar rencana sistem pencegahan pelanggaran etik anggota dewan dapat dilaksanakan secara optimal.

WAKIL KETUA MKD KAHAR MUZAKIR DIGANTIKAN SAIFUL BAHRI RURAY



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Pimpinan MKD DPR

Hal ini dia sampaikan guna menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja MKD.

"Karena ujung tombak dari penjagaan etika anggota dewan ada di MKD, sedikit banyak ini akan terkait dengan fungsi dan pemahaman MKD," papar Anggota

Dewan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat ini, di ruang rapat MKD, Rabu (13/01).

Di tahun kedua masa baktinya ini Fahri sebagai unsur Pimpinan DPR-RI menargetkan untuk memperkuat sistem pendukung dan menunjukkan pelaksanaan program secara baik. "Dalam rapat kemarin mudah-mudahan bisa selesai 30

undang-undang, agar bisa menjawab keraguan masyarakat," ungkapnya.

Hadir dalam peresmian keanggotaan sekaligus Wakil Ketua MKD dari FPG ini Ketua MKD Surahman Hidayat dan Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad serta sepuluh anggota MKD lainnya. ([se,mp](https://www.semp.com))/foto:naefurodji/parle/iw.

PARIPURNA DPR SAHKAN DEWAS BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN



Ketua Komisi IX Dede Yusuf dan Pimpinan DPR

Rapat Paripurna DPR dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon menyetujui dan mengesahkan 10 anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (2/2) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

FADLI yang didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F PAN), Fahri Hamzah (F PKS) dan Agus Hermanto (F Demokrat), sebelumnya mendengarkan laporan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf terkait laporan uji kelayakan dan kepatutan Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Menurut Dede Yusuf, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terpilih 7 orang profesional yang terdiri atas 2 orang unsur

Pemerintah, 2 orang unsur Pekerja, 2 orang Unsur Pemberi kerja dan 1 orang unsur Tokoh Masyarakat.

Ke tujuh orang Dewas BPJS Kesehatan tersebut adalah Michael Johannis Latuwael dan Roni Febrianto (Unsur Pekerja), Misbahul Munir dan La Tunreng (Unsur Pemberi Kerja) dan Karun (Tokoh Masyarakat).

Sedangkan Dewas BPJS Ketenagakerjaan terpilih 5 orang terdiri

Eko Darwanto dan Rekson Silaban (Unsur Pekerja), M. Aditya Warman dan Inda D. Hasman (Unsur Pembeber kerja) dan Poempida Hidayatulloh (Unsur Tokoh Masyarakat).

Hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang disampaikan Ketua Komisi IX tersebut akhirnya secara aklamasi disetujui oleh para anggota yang hadir dalam rapat paripurna DPR dan diketuk palu oleh Fadli Zon sebagai tanda pengesahan. Selanjutnya nama-nama Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan akan disampaikan kepada pemerintah. (rnm,mp), foto : tim_iwan/parle/hr.



Ketua DPR Ade Komarudin meninjau sejumlah fasilitas di lingkungan DPR RI, Minggu (7/02/2016).
Ade didampingi beberapa pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI
Foto : Tim Fotografer/Parle/HR



Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR meninjau fasilitas di Bandara Ngurah Rai, Bali dan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jumat (15/01/2016)
Foto : Agung & Nita/Parle/HR



Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII, Mulyadi, memantau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jerajang di Lombok (21/12/2015)
Foto : Jaka Nugraha/Parle/HR